

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhamad Gusti Farhan

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

Jl Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan

Muhammadgustifarhan19@gmail.com

Kartika Rachma Sari

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

Jl Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan

kartikasyahru@yahoo.co.id

Muhammad Husni Mubarok

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

Jl Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan

mhusnimubarok@polsri.ac.id

Article's History:

Received 15 Oktober 2023; Received in revised form 29 Oktober 2023; Accepted 8 November 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Farhan, M. G., Sari, K. R., & Mubarok, M. H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (6). 2358-2370. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1620>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa anggaran terhadap realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 7 Kabupaten/Kota, dan sampel penelitian terdiri dari 7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tahun 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal dengan koefisien determinasi sebesar 46%. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.

Pendahuluan

Sejak diberlakukan reformasi keuangan pada tahun 2001, Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal. Langkah ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara ini.

Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat telah membagi sebagian tanggung jawab keuangan kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sebagian pendapatan serta membuat keputusan mengenai pengeluaran di wilayahnya. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan fiskal, mengelola pajak daerah, serta mengatur dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

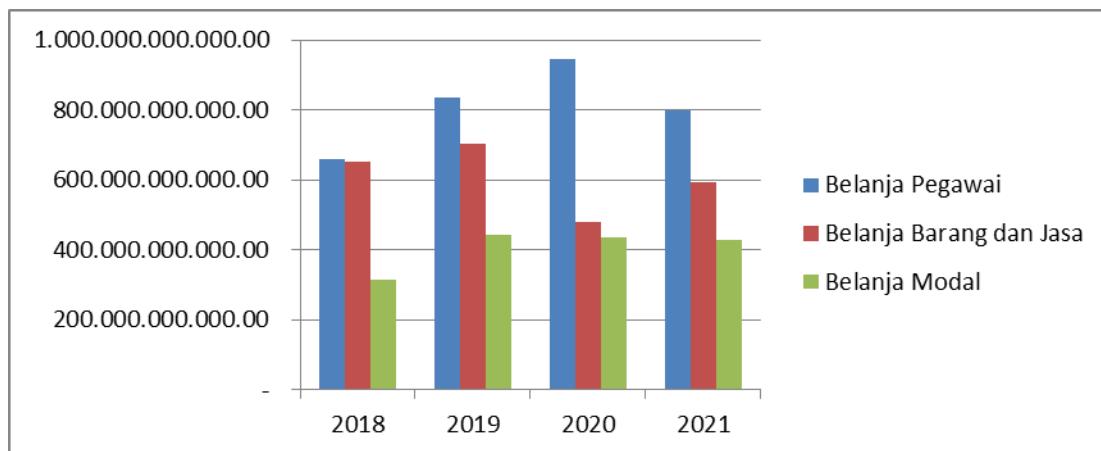
Berlakunya desentralisasi fiskal telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pemerintah daerah kini memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur keuangan mereka sendiri dan membuat keputusan tentang pengeluaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan khusus setiap daerah. Peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik, menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal di sektor publik, pemerintah daerah harus meningkatkan realisasi anggaran. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam masalah realisasi belanja modal. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal telah mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah, sehingga realisasi belanja modal masih berada di bawah target rata-rata nasional.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap atau meningkatkan nilai aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian belanja modal bertujuan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sayangnya, selama ini pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan pendapatan daerah untuk belanja operasi yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) periode daripada belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode.

Akibatnya, terjadi permasalahan yaitu rendahnya realisasi belanja modal. Rendahnya realisasi belanja modal dapat menghambat pembangunan fasilitas pelayanan publik di daerah, termasuk proyek pembangunan, infrastruktur, serta menyebabkan penurunan daya saing ekonomi dan kesenjangan pembangunan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 1. Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : data yang diolah (2023)

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi belanja modal adalah dengan melakukan pemberhanan manajemen penerimaan daerah, khususnya dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah tersebut, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi pendapatan dari pajak daerah, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah. Tingkat PAD di setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada kekayaan alam dan potensi ekonomi yang dimiliki. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar daripada daerah lainnya, yang dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah yang kaya dan daerah yang tertinggal.

Dalam mengatasi ketimpangan ini dan meningkatkan realisasi belanja modal, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan PAD dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan serta mengurangi potensi kebocoran atau penyimpangan. Upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi, serta menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi dengan daerah yang memiliki PAD rendah dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan. Transfer pendapatan antardaerah atau pembagian hasil dari kekayaan alam dapat membantu daerah yang lebih tertinggal dalam mewujudkan proyek pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mengelola pendapatan asli daerah, meningkatkan realisasi belanja modal, dan menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dana perimbangan ini memiliki tiga jenis utama: dana lokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana lokasi umum adalah alokasi dana dari pemerintah pusat yang membantu membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana alokasi khusus adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi daerah. Sedangkan, dana bagi hasil merupakan bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di daerah dan diberikan kembali kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan memastikan pemerataan pendapatan serta akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pendanaan yang adil ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. Hal ini mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh nusantara dan memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional.

Selain pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan salah satu sumber pendanaan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Khususnya dalam hal belanja modal, SiLPA memiliki peran penting sebagai sumber dana untuk mendukung kegiatan belanja modal pada tahun berikutnya. Apabila pemerintah daerah memiliki SiLPA yang besar, sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi belanja modal. Penggunaan SiLPA dalam belanja modal dapat mencakup pembiayaan proyek infrastruktur yang masih berjalan, sehingga proyek-proyek yang telah dimulai dapat selesai tepat waktu tanpa kekurangan dana. Selain itu, SiLPA juga dapat digunakan untuk memulai proyek baru yang telah direncanakan sebelumnya, yang mungkin sebelumnya belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Dengan memanfaatkan SiLPA secara efisien dan efektif, pemerintah daerah dapat berkontribusi pada peningkatan investasi dalam pembangunan fisik dan infrastruktur di wilayahnya. Hal ini akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh warga di daerah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan SiLPA dengan baik menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan mengenai latar belakang di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui (1) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap realisasi belanja modal, (2) bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap realisasi belanja modal, (3) bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap realisasi belanja modal, (4) bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap realisasi belanja modal (5) bagaimana pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap realisasi belanja modal. Dan (6) bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA secara simultan terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* memang mencakup hubungan antara dua belah pihak, yaitu prinsipal (pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan) dan agen (pihak yang bertindak atas nama prinsipal). Pada dasarnya, teori keagenan mencoba untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Prinsipal biasanya ingin agen bertindak untuk kepentingan prinsipal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, agen juga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mendorong keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada prinsipal.

Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi." Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum."

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil kekayaan daerah untuk digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat." Tujuan dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil dari penguasaan dan pemilikan atas tanah dan bangunan, serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka membantu membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana alokasi umum bersifat "*Block Grant*" artinya penggunaanya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa "Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dapat dialokasikan dana antar daerah untuk mengembangkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Tujuan dari DAU adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan berbagai program dan layanan publik bagi masyarakat setempat. Dana alokasi umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, dan sebagainya. Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung keuangan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa "Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN." DAK diberikan untuk mendukung berbagai program dan proyek prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Program dan proyek ini dapat beragam, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai inisiatif pembangunan lainnya.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan sumber daya alam yang dikumpulkan di daerah tersebut. DBH berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dari eksplorasi sumber daya alam di wilayah pemerintah daerah. Contoh pendapatan dari sumber daya alam ini bisa berupa royalti, bagi hasil pajak, dividen, atau lainnya. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi penghasil sumber daya alam di daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA adalah selisih kurang/lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Surplus anggaran menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efisien, mengurangi utang, atau melakukan investasi yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Metodelogi

Sampling jenuh, juga disebut sebagai sensus, adalah metode pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini. Populasi penelitian ini terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampel terdiri dari 7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tahun 2018-2021

Analisis regresi linier berganda dengan SPSS V25 adalah pengujian yang akan diterapkan. Analisis akan terdiri dari lima tahap yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda, uji koefisien determinan, dan uji hipotesis yang meliputi uji t parsial dan uji f simultan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_X1	28	49427844307	191938969495	107121263491.43	43764672177.285
DAU_X2	28	415532093000	552780809000	457875357616.64	35197654288.262
DAK_X3	28	86062744466	182233340397	130379261196.64	26160997318.153
DBH_X4	28	41443900249	144705844680	84420856066.57	26351020977.978
SILPA_X5	28	2930690744	212157900112	96596637072.75	53583463738.540
Realisasi_Belanja_Modal_Y	28	83174500800	25111558574	162641313128.79	46220535246.755
Valid N (listwise)	28				

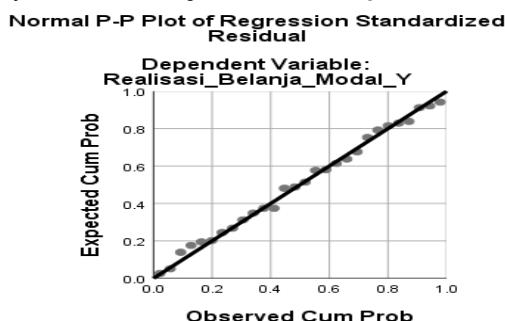
Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Tabel 4.1 memberikan penjelasan mengenai statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian pada laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah rincian statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Variabel Pendapatan Asli Daerah nilai terendah (minimum): Rp 49.427.844.307 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun anggaran 2018. Nilai tertinggi (maximum): Rp 191.938.969.495 dari Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2018. Nilai rata-rata (mean): Rp 107.121.263.491.43. Standar deviasi: Rp 43.764.672.177.285. Variabel Dana Alokasi Umum nilai terendah (minimum): Rp 415.532.093.000 dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2021. Nilai tertinggi (maximum): Rp 552.780.809.000 dari Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2019. Nilai rata-rata (mean): Rp 457.875.357.616.64. Standar deviasi: Rp 35.197.654.288.262. Variabel Dana Alokasi Umum nilai terendah (minimum): Rp 86.062.744.466 dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2021. Nilai tertinggi (maximum): Rp 182.233.340.397 dari Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2021. Nilai rata-rata (mean): Rp 130.379.261.196.64. Standar deviasi: Rp 26.160.997.318.153. Variabel Dana Bagi Hasil nilai terendah (minimum): Rp 41.443.900.249 dari Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2020. Nilai tertinggi (maximum): Rp 144.705.844.680 dari Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2021. Nilai rata-rata (mean): Rp 84.420.856.066.57. Standar deviasi: Rp 26.351.020.977.978. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran nilai terendah (minimum): Rp 2.930.690.744 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun anggaran 2020. Nilai tertinggi (maximum): Rp 212.157.900.112 dari Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2018. Nilai rata-rata (mean): Rp 96.596.637.072.75. Standar deviasi: Rp 53.583.463.738.540. Variabel Realisasi Belanja Modal nilai terendah (minimum): Rp 83.174.500.800 dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2020. Nilai tertinggi (maximum): Rp 251.115.588.574 dari Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2019. Nilai rata-rata (mean): Rp 162.641.313.128.79. Standar deviasi: Rp 46.220.535.246.755.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot of Regression standardized residual



Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Berdasarkan grafik *normal probability plot* pada Gambar 2, terlihat bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini membentuk titik-titik yang menyebar di sekitar garis normal. Hal ini menunjukkan bahwa secara visual data cenderung mengikuti distribusi normal. Namun, penting untuk diingat bahwa uji normalitas grafik tidak sepenuhnya akurat, dan secara statistik belum tentu menjamin normalitas data.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000572
	Std. Deviation	30644315136.43641000
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.066
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Tabel 2. Asimp. Sig. 0,200 untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai residual data penelitian adalah normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan dapat memenuhi persyaratan asumsi klasik.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1 PAD_X1	.317	3.157	
DAU_X2	.408	2.448	
DAK_X3	.768	1.302	
DBH_X4	.596	1.676	
SILPA_X5	.393	2.546	

a. Dependent Variable:

Realisasi_Belanja_Modal_Y

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3, dapat diamati hasil perhitungan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel sebagai berikut. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,317 (> 0,10) dan VIF sebesar 3,157 (< 10). Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai tolerance sebesar 0,408 (> 0,10) dan VIF sebesar 2,448 (< 10). Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai tolerance sebesar 0,768 (> 0,10) dan VIF sebesar 1,302 (< 10). Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai tolerance sebesar 0,596 (> 0,10) dan VIF sebesar 1,676 (< 10). Variabel SiLPA memiliki nilai tolerance sebesar 0,393 (> 0,10) dan VIF sebesar 2,546 (< 10). Berdasarkan hasil uji multikolinieritas ini, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas dan dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 ^a	.560	.461	33948489961.660	2.123

a. Predictors: (Constant), SiLPA_X5, DBH_X4, DAK_X3, DAU_X2, PAD_X1

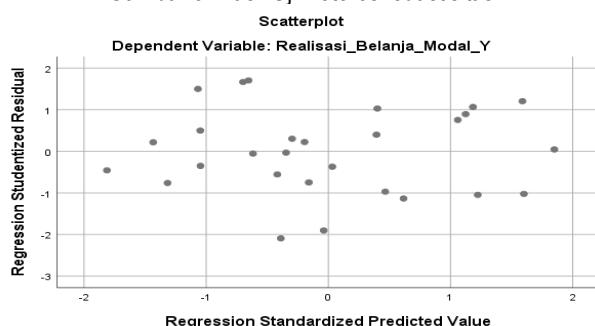
b. Dependent Variable: Realisasi_Belanja_Modal_Y

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Dalam penelitian ini, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,123. Berdasarkan perbandingan dengan nilai DL dan DU, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi karena nilai DW berada di antara nilai DL dan DU. Lebih spesifik, $DU < DW < 4-DU$ atau $1,8502 < 2,123 < 2,8502$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa scatterplot menunjukkan titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil scatterplot menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-230343654696.758	104313835444.036		-2.208	.038
	PAD_X1	-1.132	.265	-1.072	-4.267	.000
	DAU_X2	1.023	.290	.779	3.521	.002
	DAK_X3	.199	.285	.113	.699	.492
	DBH_X4	-.544	.321	-.310	-1.694	.104
	SILPA_X5	.682	.195	.791	3.507	.002

a. Dependent Variable: Realisasi_Belanja_Modal_Y

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Dilihat dari Tabel 5. maka didapat hasil regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = -230343654696.758 - 1.132X_1 + 1.023X_2 + .199X_3 -.544X_4 + .682X_5 + e$$

Nilai konstanta (a) pada penelitian ini adalah -230343654696.758. Jika pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan silpa meningkat, maka realisasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menurun sebesar 230343654696.758.

Koefisien untuk variabel PAD (b1) diketahui sebesar -1,132. Jika PAD mengalami peningkatan, maka realisasi belanja modal akan menurun sebesar 113,20%.

Koefisien regresi variabel DAU (b2) sebesar 1,023. Jika DAU mengalami peningkatan, maka realisasi belanja modal akan meningkat sebesar 102,30%.

Koefisien regresi variabel DAK (b3) diketahui sebesar 0,199. Jika DAK mengalami peningkatan, maka realisasi belanja modal akan meningkat sebesar 19,90%.

Variabel DBH (b4) diketahui memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,544. Jika DBH mengalami peningkatan, maka realisasi belanja modal akan menurun sebesar 54,40%.

Koefisien regresi untuk variabel SiLPA (b5) diketahui sebesar 0,682. Jika SiLPA mengalami peningkatan, maka realisasi belanja modal akan meningkat sebesar 68,20%.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 ^a	.560	.461	33948489961.660

a. Predictors: (Constant), SILPA_X5, DBH_X4, DAK_X3, DAU_X2, PAD_X1

b. Dependent Variable: Realisasi_Belanja_Modal_Y

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, didapatkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,461 atau 46%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki pengaruh terhadap realisasi belanja modal sebesar 46%. Namun, sebesar 54% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Secara Persial (T)

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
		B	Std. Error				
1	(Constant)	-230343654696.758	104313835444.036			-2.208	.038
	PAD_X1	-1.132	.265		-1.072	-4.267	.000
	DAU_X2	1.023	.290		.779	3.521	.002
	DAK_X3	.199	.285		.113	.699	.492
	DBH_X4	-.544	.321		-.310	-1.694	.104
	SILPA_X5	.682	.195		.791	3.507	.002

a. Dependent Variable: Realisasi_Belanja_Modal_Y

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 7, hasil uji statistik t untuk setiap variabel independen yang menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Untuk melakukan uji t ini, digunakan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,005 dengan df = 22 ($n - k - 1 = 28 - 5 - 1 = 22$), dan diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,819. Berikut adalah penjelasan hasil uji statistik t (uji parsial) yang dapat disimpulkan:

Variabel PAD berpengaruh negatif yang signifikan terhadap realisasi belanja modal karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(-4,267 > 2,819)$ dan sig. $(0,000 < 0,05)$. Variabel DAU berpengaruh positif yang signifikan terhadap realisasi belanja modal karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(3,521 > 2,819)$ dan sig. $(0,002 < 0,05)$. Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(0,699 > 2,819)$ dan sig. $(0,492 > 0,05)$. Variabel DBH tidak berpengaruh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(1,694 > 2,819)$ dan sig. $(0,104 > 0,05)$. Dan Variabel SiLPA berpengaruh positif yang signifikan terhadap realisasi belanja modal karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(3,507 > 2,819)$ dan sig. $(0,002 < 0,05)$.

Uji Hipotesis Simultan (F)

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Simultan f

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	323261233645128120000 00.000	5	646522467290252200 0000.000	5.610	.002 ^b
Residual	253549993548930550000 00.000	22	115249997067895700 0000.000		
Total	576811227194056700000 00.000	27			

a. Dependent Variable: Realisasi_Belanja_Modal_Y

b. Predictors: (Constant), SILPA_X5, DBH_X4, DAK_X3, DAU_X2, PAD_X1

Sumber: hasil yang diolah SPSS V25 (2023)

Berdasarkan Tabel 8. hasil uji statistik f menunjukkan nilai f 5,610 dengan tingkat signifikan 0,002. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA berpengaruh positif yang signifikan terhadap realisasi belanja modal belanja modal karena, nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($5,610 > 2,66$) dan nilai sig. ($0,002 < 0,05$).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan asil uji statistik t untuk pendapatan asli daerah memiliki nilai t-hitung sebesar -4,267 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (-4,267 > 2,819) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**.

Dapat disimpulkan bahwa, PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup terbilang tinggi dari tahun 2018-2021. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), jika pendapatan asli daerah meningkat, maka realisasi belanja modal akan menurun. Sebaliknya, jika pendapatan asli daerah menurun, maka realisasi belanja modal meningkat. Walaupun setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak teratur setiap tahunnya atau mengalami fluktuasi, begitu juga yang terjadi dengan realisasi belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Nur Abdi Aulia Rahman, (2018), dan Farhan Kresna Pramudya dan M. Faisal Abdullah, (2021) yang mengatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah secara persial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deda Abdul Azis, (2019) dan Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo, (2022) yang mengatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk dana alokasi umum memiliki nilai t-hitung sebesar 3,521 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,521 > 2,819$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Artinya variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**.

Dana alokasi umum pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup terbilang tinggi. DAU merupakan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah selain pendapatan asli daerah. Dengan adanya transfer DAU, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik. DAU membantu mengurangi keterbatasan anggaran pemerintah daerah, terutama bagi daerah-daerah dengan PAD yang rendah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Deda Abdul Azis, (2019), dan Fitri Dwi Jayanti, (2020) yang mengatakan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo, (2022) dan Divo Harzah Diputra, Farida Idayati, (2023) yang mengatakan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk dana alokasi khusus memiliki nilai t-hitung sebesar 0,699 dan nilai signifikansi sebesar 0,492. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($0,699 > 2,819$) dan nilai sig. ($0,492 > 0,05$). Artinya variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

2,819) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,492 < 0,05$). Artinya variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa **H3 ditolak**.

Dana Alokasi Khusus diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kegiatan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2021, DAK banyak digunakan untuk keperluan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kemudian disalurkan kembali ke masing-masing Satuan Pendidikan Dasar per Kabupaten/Kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Hibah BOS dalam hal ini lebih bersifat sebagai dukungan operasional untuk sekolah-sekolah guna mendukung kegiatan sehari-hari dan berbagai komponen yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Divo Harzah Diputra, Farida Idayati, (2023), dan Fitri Dwi Jayanti, (2020) menyatakan bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryana, (2018) dan Rosmayanti, H Haliah, Andi Kusuma, (2023) yang mengatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk dana bagi hasil memiliki nilai t-hitung sebesar 1,694 dan nilai signifikansi sebesar 0,104. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($1,694 > 2,819$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,104 < 0,05$). Artinya variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa **H4 diterima**.

Secara umum, dana bagi hasil seharusnya berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal karena DBH merupakan salah satu pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Namun, dalam penelitian ini DBH tidak berpengaruh sama sekali terhadap realisasi belanja modal. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya DBH terhadap belanja modal contohnya pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengeluran mereka. Jika pemerintah daerah tersebut lebih memprioritaskan belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal, kemungkinan DBH tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. fluktuasi juga mempengaruhi ketersediaan dana untuk belanja modal dan menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Endah Ayuning Tiyasa dan Eni Wuryani, (2022) dan Muhammad Syukri dan M. Alhudhori dan R. Adisetiawan, (2022) menyatakan bahwa variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deda Abdul Azis, (2019) dan Yohannes Cosmas Simbolon Azhar Maksum, Erwin Abubakar, (2020) yang mengatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki nilai t-hitung sebesar 3,507 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,507 > 2,819$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Artinya variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa **H5 diterima**.

SiLPA yang positif menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah daerah lebih besar dari total belanja dalam anggaran tertentu. Ketik SiLPA bernilai positif, pemerintah daerah memiliki sumber dana tambahan yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan proyek belanja modal atau investasi jangka panjang. SiLPA yang besar diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap realisasi belanja modal dalam melakukan pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik dan program pembangunan lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Pika Saipul dan Aprila Nila, (2018) dan Angrah Rezka Alifa dan Sri Rahayu, (2022) menyatakan bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Al Habib Ahmad Nasution, Kiagus Zainal Arifin, Choiruddin, (2022) dan Meta Nisa Arthadela, Titik Mildawati (2023) yang mengatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Secara Simultan terhadap Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik f menghasilkan nilai f-hitung sebesar 5,610 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. F hitung menunjukkan nilai lebih besar dari pada f-tabel ($5,620 > 2,66$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Artinya variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa **H6 diterima**.

Untuk penelitian ini belum dapat penulis bandingkan dengan penelitian lainnya, karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Variabel DAU dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal. Variabel DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Sedangkan secara simultan, variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Referensi

- Anggra Rezka Alifa dan Sri Rahayu, (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Pada *E-Proceeding of Management*, 9(2), 541–548. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17624%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17624/17368>
- Anika Syahdila Putri Muchtolifah Sishadiyati, (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION*, 3, 85–92.
- Aprionis, (2021). *Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. ANTARA BABEL. <https://babel.antaranews.com/berita/209998/kanwil-djpb-realisasi-dak-fisik-di-babel-masih-1113-persen>
- Arini Ilma dan Sri Rahayu, (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Study pada Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2014-2017. *E-Proceeding of Management*, 6, 5777.
- Badan Pemeriksa Keuangan, (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan*. <Https://Www.Bpk.Go.Id>. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
- Badan Pusat Statistik, (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*. <Https://Babel.Bps.Go.Id>.
- Deda Abdul Azis, (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016 - 2017). *Jurnal Economics and Digital Business*.
- Diah Ayu Kharismadani dan Yanita Hendarti, (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018. *Surakarta Accounting Review (Sarev)*, 1(1), 26–33.
- Divo Harzah Diputra, Farida Idayati, (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 634–645. <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.203>
- Endah Ayuning Tiyasa dan Eni Wuryani, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 22–33. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p22-33>

Farhan Kresna Pramudya dan M. Faisal Abdullah, (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura. *INOVASI*, 17(4), 653–660.

Fitri Dwi Jayanti, (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>

Hartono. (2020). *Metode Penelitian Skripsi dengan Aplikasi SPSS*. CV BUDI UTAMA.

Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016 - 2021. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 231–245. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i2.1671>

Meta Nisa Arthatela, Titik Mildawati (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Muhammad Syukri dan M. Alhudhori dan R. Adisetiawan, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>

Nur Abdi Aulia Rahman, (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pika Saipul dan Aprila Nila, (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *JURNAL FAIRNESS*, 8(2), 125–140. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15202>

Rosmayanti dan H Haliah dan Andi Kusuma, (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. *Jurnal Economics and Digital Business*, 4(1), 42–51.

Sayyid Al Habib Ahmad Nasution dan Kiagus Zainal Arifin dan Choiruddin, (2022). Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Immiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1(No.9), 1637–1656.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suryana, (2018). The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 67–72. <https://doi.org/10.17509/jimb>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yohannes Cosmas Simbolon Azhar Maksum dan Erwin Abubakar, (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio*

JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)

E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891

Volume 9 (6) Desember Tahun 2023, Hal 2358-2370.

Humaniora, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>